

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KPU Kabupaten Sleman

a. Visi dan Misi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman memiliki sebuah visi yang telah ditetapkan. Visi ini mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan KPUD Sleman dimasa depan. Sedangkan misi yang ditetapkan merupakan “*the chose track*” atau peran strategis yang ingin dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai visi tersebut.

Visi

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non partisipan, tidak memihak, transparan, dan professional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum Demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

Misi

- 1) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat public lain yang ditentukan Undang-undang.
- 2) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
- 3) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk peningkatan kualitas Pemilihan Kepala Daerah berikutnya.

b. Komisioner KPU Kabupaten Sleman

- 1) Djajadi, Ketua KPU Kabupaten Sleman
- 2) Hamdan Kurniawan, S.IP, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Informasi
- 3) Suryatiningsih Budi Lestari, SH, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sleman

- 4) Hazwan Iskandar Jaya, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas, dan SDM.
- 5) Lukmanul Hakim, Divisi Umum, Rumah Tangga, dan Organisasi

c. Struktur Kelembagaan

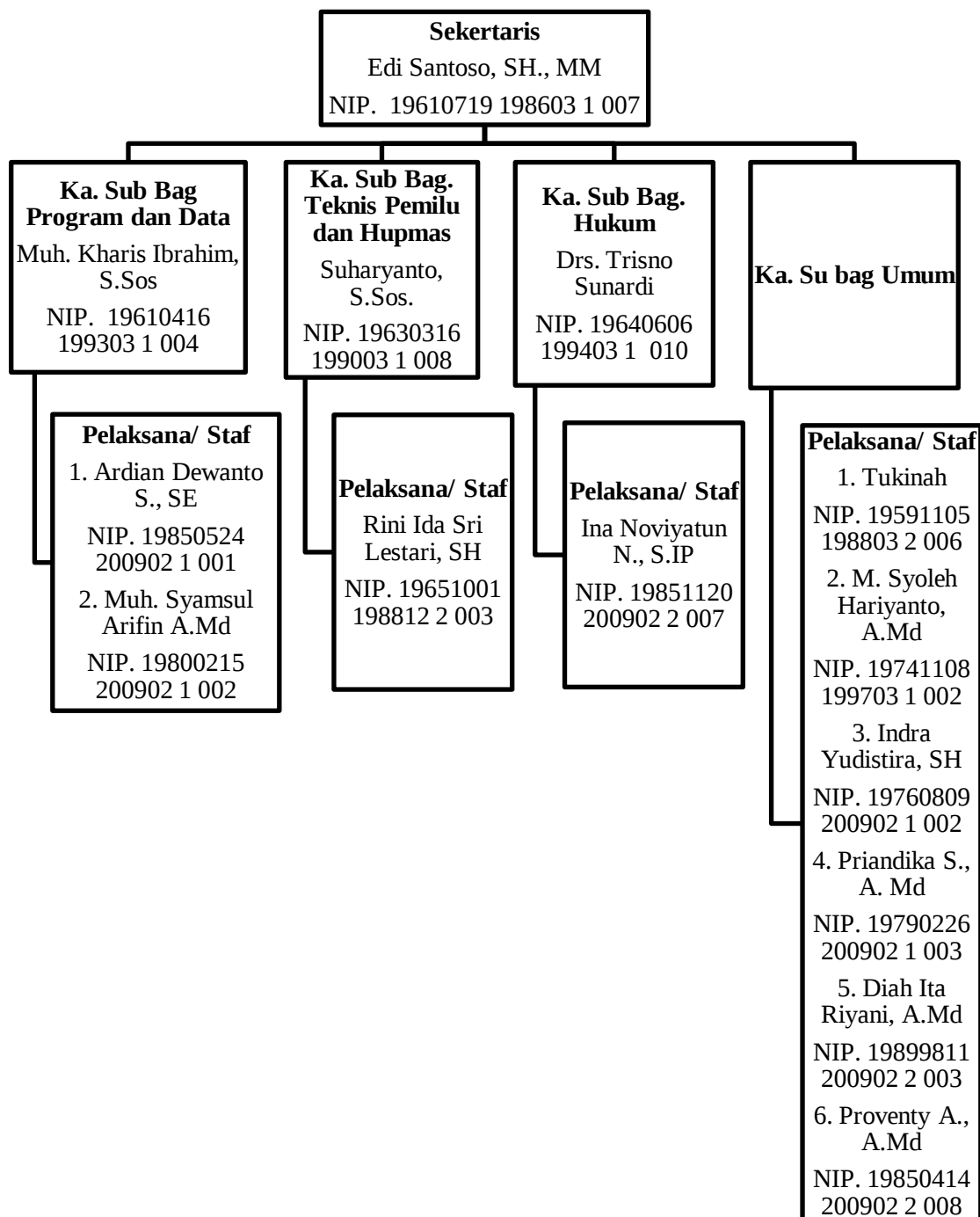
Kelembagaan KPU Kabupaten Sleman terdiri dari KPU (komisioner-komisioner KPU) dan Sekretariat KPU. Antara KPU dan Sekeretariat KPU memiliki hubungan administratif dan struktur dalam penyelenggaraan Pemilukada. Adapun struktur penyelenggara Pemilukada sebagai berikut:

d. Badan-badan dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dalam kelembagaan KPU Kabupaten Sleman terdapat badan-badan penunjang kinerja KPU. Badan yang paling utama adalah sekretariat KPU Kabupaten Sleman. Sekretariat ini pada awalnya membantu Tim Seleksi pemilihan anggota KPU Kabupaten Sleman.

Pasca komisioner KPU Kabupaten Sleman terpilih, sekretariat ini bertugas membantu tugas KPU Kabupaten Sleman dalam urusan administratif. Badan ini bertugas mengurus keluar masuk surat serta pengetikan segala hal terkait dengan tugas dan wewenang KPU.

BAGAN 3.
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN



Badan-badan lain adalah badan yang membantu dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada. Badan ini bekerja di bawah KPU Kabupaten Sleman. Adapun badan-badan tersebut yaitu:

- a) Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- b) Tingkat Kelurahan, Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- c) Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Agar pemilu atau pemilukada berjalan dengan baik diperlukan pengawalan secara menyeluruh pada tiap-tiap tahapan pemilu. Untuk itu terdapat badan khusus yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Di tingkat kabupaten terdapat panitia pengawas pemilu, di tingkat kecamatan terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

2. Deskripsi Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini diambil 8 subjek penelitian, yang terdiri dari komisioner KPU Kabupaten Sleman dan guru peserta program pendidikan politik KPU. Masing-masing subjek diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Kendati demikian, saat memerlukan pendalaman atau pemahaman lebih lanjut diajukan pertanyaan-pertanyaan secara spontan.

Berikut data lengkap dari masing-masing nara sumber/subjek penelitian:

Tabel 4. Data Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Djajadi	Ketua KPU Kabupaten Sleman
2	Hazwan Iskandar Jaya	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas, dan SDM
3	Hamdam Kurniawan, S.IP.	Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Informasi
4	Drs. Rahadi	Guru PKn di SMA N 1 Sleman dan selaku guru pendamping workshop pemilih pemula, guru pendamping Olimpiade Pemilu, dan guru peserta TOT
5	Supardi, S. Pd.	Guru PKn di MAN Yogyakarta 3 dan selaku guru pendamping Olimpiade Pemilu, dan guru peserta TOT
6	Drs. Pratiknyo	Guru SMA N 1 Ngaglik dan selaku guru pendamping workshop pemilih pemula, dan guru peserta TOT
7	Sukamti, S. Pd.	Guru SMA N 2 Sleman dan selaku guru pendamping workshop pemilih pemula, guru pendamping Olimpiade Pemilu, dan guru peserta TOT
8	Endang Dwi Haryani, S.Pd.	Guru SMA N 1 Turi dan selaku guru pendamping workshop pemilih pemula, guru pendamping Olimpiade Pemilu, dan guru peserta TOT
9	Meisy Nursita Sari	Peserta Olimpiade Pemilu, Perwakilan SMA N 1 Turi
10	Prisca Arzita Perdana	Peserta Olimpiade Pemilu, Perwakilan SMA N 1 Turi
11	Hasta Sih Danar	Peserta Olimpiade Pemilu, Perwakilan SMA N 1 Turi
12	Amalia Fitri Kurnia Dewi	Peserta Olimpiade Pemilu, Perwakilan dari SMA N 1 Sleman
13	Evi Yulia Setiawati	Peserta Olimpiade Pemilu, Perwakilan dari SMA N 1 Sleman
14	Adhi Pramono	Peserta workshop pemilih pemula, Perwakilan dari SMA N 1 Turi

3. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pemaparan hasil penelitian dirangkum dalam dua tema besar. Pertama, mengenai latar belakang KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Bagian pertama lebih mengungkap alasan dari KPU mengapa melaksanakan pendidikan politik. Disamping itu juga diungkap mengenai alasan mengapa KPU Kabupaten Sleman menjadikan pemilih pemula sebagai target program pendidikan politik.

Kedua, mengenai peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula. Pada bagian kedua ini akan dipaparkan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh KPU pada Tahun 2011-2012. Dijelaskan pula mengenai materi, target, tujuan, dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan politik. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut.

a. Latar belakang KPU kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga penunjang negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam menyelenggarakan pemilu KPU memiliki tugas melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi ini kemudian dilaksanakan

tidak hanya sosialisasi dalam hal tahap-tahap pemilu, sosialisasi calon-calon peserta pemilu, namun juga sosialisasi yang berbentuk pendidikan politik.

Salah satu KPU di tingkat kabupaten yang menyelenggarakan pendidikan politik adalah KPU Kabupaten Sleman. Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh pihak KPU Kabupaten Sleman perihal pelaksanaan pendidikan politik. Dalam menggali latar belakang KPU Kabupaten Sleman melaksanakan pendidikan politik, peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Djajadi (Ketua KPU Kabupaten Sleman), dan Bapak Hazwan (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas, dan SDM). Berikut deskripsi hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

Latar belakang KPU Kabupaten Sleman melakukan pendidikan politik sendiri menurut Bapak Hazwan, KPU melaksanakan pendidikan politik karena itu merupakan amanat undang-undang, yaitu amanat untuk melaksanakan sosialisasi. Sehingga pendidikan politik itu merupakan bagian tersendiri dari program KPU. Masyarakat itu tidak hanya perlu tercerahkan dalam urusan teknis pemilu, tapi juga dicerdaskan dalam masalah-masalah substantif dengan pendidikan pemilih. Sehingga masyarakat paham mengenai substansi dari pemilu, yaitu bagaimana pemilu itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bangsa dan negara. Jadi masyarakat harus diarahkan memilih pemimpin yang

berkualitas, yaitu yang memiliki kapabilitas dan mengetahui kebutuhan masyarakat.

Pemilih pemula dijadikan target program pendidikan politik sendiri menurut Bapak Djajadi (Ketua KPU Kabupaten Sleman) karena dalam waktu 5 tahun itu jumlah pemilih pemula sekitar 17-18% dari jumlah keseluruhan pemilih. Dengan jumlah yang cukup besar jangan sampai pemilih pemula menjadi apatis, tidak mengikuti pemilihan umum. Selain itu pemilih pemula juga perlu diarahkan menjadi pemilih cerdas yang memilih berdasarkan visi dan misi. Jumlah yang disebutkan Bapak Djajadi ini lebih kecil dari pada perkiraan jumlah pemilih pemula yang termuat di Buku Panduan Pemilih Pemula yaitu sekitar 20%. Dalam panduan tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan dari program pendidikan politik karena kebutuhan akan diadakannya pendidikan politik yang bersifat kontinyu. Disamping itu pemilihan target pemilih pemula disamping didasarkan pada jumlah pemilih pemula yang cukup banyak, juga didasarkan pada kondisi pemilih pemula yang selama ini sering dijadikan objek politik bukan subjek politik yang harus dicerdaskan.

Bapak Hazwan menambahkan pemilih pemula itu merupakan pemilih yang baru ikut dalam proses pemilu sehingga tidak atau belum terkontaminasi dengan residu politik. Residu politik itu seperti *money politic* dan kampanye hitam. Jadi pemilih pemula perlu dibentuk pola pikir atau paradigma politiknya agar terhindar dari residu politik tadi.

Dari kedua pendapat tersebut terlihat jelas bahwa alasan pokok pemilihan pemilih pemula menjadi target sasaran program pendidikan politik adalah untuk mengupayakan pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas itu memilih dengan pertimbangan rasionalitas, seperti memilih berdasarkan visi dan misi calon. Disamping itu juga dilatar belakangi alasan proyektif dan preventif untuk membentuk pola pikir pemilih pemula. Pemilih pemula yang baru memilih untuk pertama kalinya diproyeksikan untuk tidak terpengaruh residu politik, seperti politik uang dan kampanye hitam.

Banyak agen yang berperan dalam melaksanakan pendidikan politik, seperti sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi (khususnya mata pelajaran PKn di SD sampai perguruan tinggi), media massa, keluarga, partai politik, kemudian KPU sendiri. KPU sebagai agen pendidikan politik secara akademis memang jarang diperbincangkan, tapi secara empiris terarfirmasi. Terkait dengan hal ini perlu diungkap mengenai domain pendidikan politik oleh KPU sendiri. Bapak Djajadi lebih menyatakan domain pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU lebih pada hal-hal terkait penyelenggaraan pemilu. Sedangkan menurut Bapak Hazwan, domain KPU itu sama dengan agen pendidikan politik lain. Tapi fokusnya pada bagaimana proses pemilu itu dipahami secara utuh, dan bagaimana *output* pemilu dapat dikawal.

Sebagai pelaksana pendidikan politik, KPU seyogyanya juga mengetahui pendidikan politik yang dilakukan oleh beberapa agen lain, semisal PKn dan Partai Politik. Jadi peneliti menanyakan pula pandangan KPU mengenai pendidikan politik oleh partai politik dan PKn. Bapak Djajadi sendiri berpandangan kalau partai politik itu tujuannya mengarah supaya orang yang diberi pendidikan politik menjadi simpatisan, konstituen atau jadi anggota. Jadi sifatnya ideologis sedangkan terkait penyelenggaraan pemilu itu hampir tidak pernah disampaikan. Sedang menurut Bapak Hazwan partai politik itu fokusnya pada mengajak masyarakat untuk memilih parpolnya. Menurutnya selama ini parpol belum optimal melakukan pendidikan politik. Barangkali residu politik itu disumbang oleh parpol. Kalau agen pendidikan politik formal seperti PKn di sekolah beliau kurang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Hanya saja menurutnya materi-materi tentang kepemiluan itu prosentasinya amat kecil di sekolah. Jadi perlu desain khusus agar materi tentang kepemiluan memiliki porsi yang cukup besar pada mata pelajaran PKn.

Namun, sebenarnya tidak demikian. Hal ini terungkap dari wawancara dengan guru-guru PKn. Bapak Supardi (Guru PKn MAN Yogyakarta 3) dan Ibu Endang (Guru PKn SMA N 1 Turi) menilai alokasi waktu materi tentang demokrasi maupun pemilu cukup, karena ada 8 kali pertemuan. Ibu Endang menambahkan disamping 8

pertemuan di kelas 11, di kelas 10 juga ada terkait hal itu yaitu mengenai peraturan-peraturan dasar pemilu.

b. Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula

KPU Kabupaten Sleman melaksanakan fungsi sosialisasi politik dengan sosialisasi melalui berbagai media dan dengan pendidikan politik. Sosialisasi secara umum dilakukan melalui berbagai media, seperti balio/ spanduk tentang ajakan berpartisipasi dalam pemilu dan tentang tahapan pemilu, di media cetak dan elektronik. Di media elektronik dilakukan dalam bentuk *talkshow* di radio dan TV berkaitan dengan tahapan pemilu, dan menjadi pemilih yang berkualitas atau cerdas.

Sedangkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan politik dilakukan dalam bentuk workshop, Olimpiade Pemilu dan TOT yang diselenggarakan dalam program pendidikan politik bagi pemilih pemula. Program tersebut bekerjasama dengan Disdikpora Kabupaten Sleman dan SMA/SMK/MAN sederajat di Kabupaten Sleman. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2011 silam. Saat itu KPU melaksanakan program workshop yang ditujukan bagi perwakilan siswa-siswa SMA sederajat di Kabupaten Sleman. Sedangkan program TOT dan Olimpiade dilaksanakan pada tahun 2012. Program TOT ditujukan bagi guru-guru PKn SMA

sederajat di Kabupaten Sleman. Pasca mengikuti TOT guru-guru diharapkan menyampaikan materi yang didapat di sekolah masing-masing. Olimpiade Pemilu sendiri diselenggarakan bagi siswa-siswa SMA sederajat se-Kabupaten Sleman.

Secara umum ada tujuan utama yang hendak dicapai dari pelaksanaan sosialisasi maupun pendidikan politik. Tujuan-tujuan tersebut yaitu:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilu
- 3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilihan umum
- 5) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2011: 1)

Program yang ditujukan pada pemilih pemula sendiri memiliki tujuan khusus. Menurut Pak Djajadi tujuan utama dari program pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah untuk membentuk agen-agen di kalangan pemilih pemula. Sebagai contoh, saat workshop tahun 2011 ada materi tentang simulasi pemilihan umum. Diharapkan simulasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemilihan ketua osis di sekolah.

Program-program tadi secara umum mencakup materi terkait dengan pemilu (pentingnya pemilu dan sistem pemilu), demokrasi, karakteristik calon yang baik, penyusunan daftar pemilih, simulasi pemungutan suara, Pancasila, dan UUD 1945. Selanjutnya untuk lebih jelasnya ketiga program ini akan dideskripsikan di bawah ini.

1) Workshop tahun 2011

a) Tujuan kegiatan

Kegiatan workshop ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- (1) Menyediakan referensi/bahan ajar bagi guru PKn sebagai bagian dari skateholder pendidikan atau secara luas dimaknai dengan pendidikan demokrasi
- (2) Mewujudkan upaya pendidikan yang berkesinambungan dan tidak instan atau menjelang digelarnya Pemilu saja
- (3) Terbentuknya pemilih pemula yang berkualitas dan siap berperan aktif dalam agenda demokrasi

(Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2011: 2)

b) Sasaran dan waktu kegiatan

Sasaran program ini adalah para siswa SMA/SMK sederajat dan didampingi seorang guru pendamping. Setiap sekolah mengirimkan perwakilan 5 siswa, dan 1 guru. Pelaksanaan workshop dibagi menjadi 3 zona, yaitu Sleman Timur, Sleman Tengah, dan Sleman Barat. Kelompok-kelompok dalam tiga zona tadi sebagai berikut:

Tabel 5. Pembagian Zonasi Workshop 2011

No	Zona	Peserta	Tempat Pelaksanaan
1	Timur	SMAN 1 Kalasan SMAN 1 Ngemplak SMAN 1 Prambanan SMAN 1 Cangkringan MAN Pakem	SMAN 1 Kalasan
		SMKN 1 Kalasan SMKN 1 Cangkringan SMK Muhammadiyah Prambanan SMK Muhammadiyah Berbah MAN Raden Fatah	SMKN 1 Kalasan
2	Tengah	SMAN 1 Ngaglik SMAN 2 Sleman	SMAN 2 Sleman

		SMAN 1 Turi SMAN 1 Tempel MAN Yogyakarta III	
		SMKN 1 Depok SMKN 1 Tempel SMK Muh 1 Turi SMK Muh 1 Sleman MAN Maguwoharjo	SMKN 1 Depok
3	Barat	SMAN 1 Minggir SMAN 1 Gamping SMAN 1 Mlati SMAN 1 Seyegan MAN Masyithon	SMAN 1 Seyegan
		SMKN 2 Godean SMKN 1 Seyegan SMK Muhammadiyah Gamping SMK Muhammadiyah Mlati MAN Godean	SMKN 2 Yogyakarta

Sumber: Lampiran surat KPU Kabupaten Sleman, No: 041/KPU 013329625/VII/2011, tanggal 07 Juli 2011

Pelaksanaan program di enam sekolah seperti pada tabel di atas terbilang sukses. Peserta workshop sangat antusias mengikuti serangkaian kegiatan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan nara sumber workshop maupun

ketika wawancara dengan guru pendamping workshop, dan peserta workshop. Menurut Bapak Hamdan maupun Bapak Hazwan menyatakan bahwa peserta workshop sangat antusias. Hampir semua berpartisipasi aktif dalam program tersebut dengan bertanya, dan menyumbangkan gagasan dalam diskusi. Hal senada juga dikatakan oleh guru-guru pendamping workshop, Bapak Rahadi (Guru PKn di SMA N 1 Sleman), Bapak Pratiknyo (Guru PKn di SMA N 1 Ngaglik), Ibu Sukamti (Guru PKn di SMA N 2 Sleman), dan Ibu Endang (Guru PKn di SMA N 1 Turi) mengatakan bahwa antusiasme peserta workshop amat tinggi. Siswa-siswa peserta workshop aktif dalam diskusi, dalam bermain peran saat simulasi, dan ketika menggunakan metode meta plan.

c) Materi dan Metode

Materi dan metode yang disampaikan dalam workshop adalah sebagai berikut (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2011: 3):

Materi: Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dalam 4 (empat) sesi mencakup Pentingnya Pemilu, Karakteristik Calon yang Baik, Penyusunan Daftar Pemilih, dan Simulasi Pemungutan Suara.

Metode: Metode yang dipakai mengadopsi dari program BRIDGE (*Building Resources In Democracy, Government and Election*) yang dicetuskan oleh UNDP (*United Nation for*

Development Program) dengan menggali tata cara aplikasi pendidikan pemilih agar menarik dan menyenangkan serta dapat diajarkan secara kontinyu di sekolah. Pola BRIDGE ini mengedepankan keaktifan peserta/siswa sehingga secara langsung terlibat dalam memahami arti penting dan tahapan teknis pemilu.

Guru-guru pendamping workshop tahun 2011,

Bapak Rahadi (guru PKn di SMA N 1 Sleman), Ibu Sukamti (Guru SMA N 2 Sleman), dan Bapak Pratiknyo (Guru SMA N 1 Ngaglik) juga mengatakan bahwa materi workshop di tahun 2011 seputar materi-materi di atas. Begitu juga dengan para peserta workshop, mereka juga mengatakan bahwa materi saat itu berkisar pada pentingnya pemilu, karakteristik pemimpin yang baik, simulasi pemilihan umum, dan penyusunan daftar pemilih.

Terkait metode sendiri disamping metode BRIDGE ada metode-metode tambahan, seperti *role playing* dan *meta plan*. Penggunaan kedua metode tambahan ini terungkap dari wawancara dengan Bapak Hamdam (Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Informasi), beliau mengatakan metode yang digunakan bermacam-macam diantaranya *role playing* (bermain peran), dan *meta plan*. Bermain peran contoh bermain peran sebagai KPPS. *Meta plan* sendiri digunakan untuk menganalisis kriteria-kriteria calon pemimpin yang baik. Disediakan daftar kriteria-kriteria calon pemimpin. Kemudian siswa menganalisis

mana kriteria yang tepat untuk pemimpin yang baik. Intinya kita ingin melibatkan siswa/peserta secara aktif.

Bapak Hazwan juga menambahkan disamping metode *bridge* ada beberapa metode lain, beliau mengatakan “Metode kita memakai metode *bridge*, ada *role playing*, *games* dan *ice breaking*, dan juga *meta plan* (kertas tugas).

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Endang Dwi Haryani (Guru SMA N 1 Turi) yang mengatakan bahwa metode yang digunakan antara lain *meta plan* dan *role playing*.

d) Narasumber

Narasumber workshop dari komisioner KPU Kabupaten Sleman, yaitu Bapak Hazwan Iskandar Jaya, dan Bapak Hamdan Kurniawan, S.IP. Dalam prakteknya Bapak Hazwan Iskandar Jaya merupakan narasumber pokok dari program ini. Sedangkan Bapak Hamdan menjadi narasumber di SMAN 1 Kalasan dan SMKN 1 Depok.

2) Olimpiade Pemilu tahun 2012

a) Tujuan kegiatan

Program Olimpiade Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut:

- (1) Memberi pemahaman tentang aspek-aspek demokrasi dan pemilu kepada pemilih pemula tingkat SMA sederajat.
- (2) Mendorong pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilukada (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2012: 3)

Bapak Djajadi juga menambahkan bahwa olimpiade pemilu ini bertujuan memberi pemahaman kepada mereka (siswa) mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu 2014 mendatang (www.jogjatv.tv). Tujuan ini secara substantif sama dengan tujuan kedua yang secara eksplisit disebutkan dalam laporan kegiatan ini.

Tujuan untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu agaknya mengena pada peserta pemilu. Dari beberapa peserta Olimpiade yang diwawancara penulis mereka menyatakan keinginannya untuk aktif dalam pemilu maupun pemilukada. Alasannya, (1) sebagai warga negara yang baik, dan (2) ingin menentukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik menurut mereka adalah pemimpin yang jujur, dapat dipercaya, sederhana, dan peduli terhadap rakyatnya.

b) Sasaran, waktu, dan mekanisme kegiatan

Kegiatan ini ditujukan bagi siswa dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Sleman. Waktu pelaksanaan olimpiade di bagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap pendaftaran, tahap penyisihan, dan tahap final. Berikut secara rinci tahap pelaksanaan olimpiade (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2012: 3-4):

(1) Tahap pendaftaran

Pendaftaran dimulai pada tanggal 4-9 Mei 2012. Pendaftaran dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Sleman di Jl. Merbabu No. 19, Beran, Sleman.

(2) Tahap penyisihan

Tahap penyisihan dilakukan pada hari Sabtu, 12 Mei 2012 di Kantor Balai Besar Latihan Ketransmigrasian (BBLK) Provinsi DIY, Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Pada tahap ini peserta akan diuji pengetahuannya tentang materi Olimpiade Pemilu (Cerdas Cermat Pemilu) dengan mengisi soal-soal yang telah disediakan oleh Panitia Penyelenggaraan secara kelompok. Kemudian dewan juri akan memilih dan menetapkan 4 kelompok berdasarkan urutan tertinggi. Keempat kelompok tersebut akan maju ke Tahap Final pada waktu yang telah ditentukan.

(3) Tahap final

Final dilaksanakan pada hari Rabu, 16 Mei 2012 di Aula Bappeda, Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Kelompok peserta maju dalam tahap final akan dipertandingkan dalam bentuk cerdas cermat. Cerdas cermat akan dipimpin oleh Dewan Juri yang independen. Dalam cerdas cermat ini akan dipilih pemenang untuk Juara I, II, III, dan Juara Harapan.

(4) Materi kegiatan

Materi olimpiade terdiri dari empat tema yaitu, Pancasila, UUD 1945, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan pemilihan umum di Indonesia. Materi-materi tersebut secara eksplisit ada dalam laporan kegiatan olimpiade. Para peserta olimpiade juga menyatakan bahwa materi-materi itulah yang ditanyakan dalam olimpiade, seperti yang dinyatakan oleh Meisy, Prisca, dan Hasta (peserta olimpiade dari SMA N 1 Turi). Menurut mereka materi-materi tersebut ada yang mudah ada yang sulit. Materi-materi yang sulit terkait tentang pemilu yang didalamnya memuat lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Disamping itu materi tentang partai politik juga cukup sulit menurut mereka.

(5) Pemenang Olimpiade Pemilu

Dalam olimpiade tersebut SMA N 1 Sleman meraih Juara pertama, menyisihkan 67 tim dari 48 SMA dan SMK di Kabupaten Sleman. Sementara Juara 2 diraih oleh tim SMKN 2 Depok dan juara ketiga dan juara keempat masing-masing diraih oleh tim SMAN 2 Nganglik dan SMAN 2 Sleman (www.jogjatv.tv).

3) TOT tahun 2012

a) Tujuan kegiatan

Kegiatan TOT ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- (1) Memberi pemahaman tentang aspek-aspek demokrasi dan pemilu, serta pemilu di Indonesia kepada guru-guru PKn tingkat SMA/SMK/MA sederajat
 - (2) Mendorong guru-guru PKn menjadi agen sosialisasi bagi anak didiknya melalui proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolahnya masing-masing
 - (3) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemilu dan pilukada
- (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pilukada, 2012: 6)

b) Sasaran dan waktu kegiatan

Kegiatan ini ditujukan untuk 50 peserta yang terdiri dari guru-guru PKn Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Sleman

c) Narasumber

Narasumber dalam kegiatan ini mengundang pembicara dari instansi lain dan pembicara dari KPU Kabupaten Sleman sendiri. Pembicara dari instansi lain adalah Drs. Mohammad Najib, M.Si yang merupakan anggota KPU Provinsi DIY (pada tahun 2012), selaku Divisi Hubungan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Beliau juga merupakan dosen luar biasa Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Pembicara dari KPU Kabupaten Sleman ada tiga, pertama Bapak Hazwan Iskandar Jaya (Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, hupmas, dan SDM, kedua Bapak Hamdan (Divisi teknis penyelenggaraan dan data informasi, dan ketiga Bapak Lukman Hakim, S.IP (Divisi rumah tangga, dan organisasi).

d) Materi dan metode kegiatan

Materi TOT ini terdiri dari demokrasi, sistem pemilu (secara umum dan yang dipakai di Indonesia), pemilu di Indonesia, pencalonan, dan penyusunan daftar

pemilih (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2012: 7).

Memang keempat materi tersebut yang disampaikan saat TOT. Hal ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan beberapa peserta TOT. Bapak Rahadi (Guru SMA N 1 Sleman), Bapak Pratiknyo (Guru SMA N 1 Ngaglik) menyatakan bahwa materi-materi saat TOT seputar empat materi tadi.

Terkait dengan metode yang digunakan sendiri Bapak Hamdan mengatakan bahwa TOT itu menggunakan metode orang dewasa. Secara aplikatif diterapkan metode diskusi, ceramah klasikal dengan media *power point* dan *meta plan*.

Menurut Bapak Hamdam ada beberapa guru yang kurang memahami tentang sistem pemilu distrik dan proporsional. Hal ini menurutnya terjadi saat penyampaian materi sistem pemilu dengan menggunakan metode *meta plan*. Ada guru yang salah menempatkan *meta plan* yang disediakan, yang seharusnya ditempatkan sebagai ciri-ciri sistem distrik justru di tempatkan di sistem proporsional.

Terkait dengan adanya guru yang kurang memahami materi tentang sistem pemilu, Bapak Supardi

(Guru PKn di MAN Yogyakarta III) membenarkan hal itu. Beliau menegaskan bahwa itu tidak banyak, karena rata-rata guru PKn dari sarjana PKn. Jadi sudah memahamai terkait sistem pemilu. Ketidaktahuan lebih pada masalah teknis karena Indonesia menggunakan sistem gabungan. Seperti terkait penentuan Dapil pada sistem distrik.

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh Bapak Rahadi dan Bapak Pratiknyo. Keduanya menyatakan bahwa memang ada guru yang kurang memahami sistem proporsional dan sistem distrik tapi hanya sedikit. Hal ini menurut mereka karena tidak semua guru PKn itu sarjana PKn. Apalagi sekolah swasta, biasanya guru PKn dari jurusan lain seperti jurusan pendidikan sejarah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Latar Belakang KPU Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

KPU Kabupaten Sleman merupakan penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Sleman baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilukada. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan sosialisasi politik. KPU Kabupaten Sleman sendiri disamping melaksanakan sosialisasi politik dalam hal teknis, prosedur,

juga melaksanakan sosialisasi yang lebih substantif dalam bentuk pendidikan politik. Karena pendidikan politik merupakan amanat undang-undang, yaitu amanat untuk melaksanakan sosialisasi. Sehingga pendidikan politik itu merupakan bagian tersendiri dari program KPU.

Latar belakang tersebut dapat diruntut dari undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, pada Pasal 8 diatur mengenai tugas dan wewenang KPU untuk melakukan sosialisasi pada tiap-tiap penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q diatur mengenai tugas KPU Kabupaten atau Kota untuk “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat”. Jadi KPU Kabupaten Sleman melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan sosialisasi politik dengan pendidikan politik.

Pelaksanaan sosialisasi dengan pendidikan politik, secara terminologi sesuai dengan pendapat beberapa ahli yang menyamakan pendidikan politik dengan sosialisasi politik, seperti Alfian. Alfian (1986: 245) mendefinisikan pendidikan politik sebagai sosialisasi politik dalam arti kata yang longgar. Dia menambahkan bahwa:

“Pendidikan politik (dalam arti ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul

nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”.

Dalam konteks Indonesia nilai-nilai ideal yang hendak dibangun adalah nilai-nilai Pancasila. KPU sebagai lembaga penunjang negara memiliki peran untuk menunjang keberlangsungan sistem politik yang berjalan. Dengan peran tersebut KPU dalam melaksanakan pendidikan politik harus mengarah kepada upaya-upaya memperkuat sistem politik. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan program-program yang secara eksplisit maupun implisit menyampaikan materi tentang gagasan nilai-nilai ideal yang hendak dibangun di Indonesia.

Secara eksplisit nilai-nilai tersebut muncul dalam program Olimpiade Pemilu. Dimana dalam program tersebut terdapat materi tentang Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan secara implisit nilai-nilai ideal muncul pada dua program lain, yaitu workshop dan TOT. Hal ini dapat dicermati misalnya dalam materi tentang pemilu. Ulasan mengenai pemilu tidak hanya pemilu secara umum, namun juga pemilu yang berlangsung di Indonesia. Jadi, ada orientasi khusus terhadap penguatan sistem politik di Indonesia.

Pemilih pemula sendiri dijadikan target sasaran pendidikan politik dengan alasan, (1) jumlah pemilih pemula yang potensial, sekitar 20%; (2) menjadikan pemilih pemula berpartisipasi aktif dalam pemilu dan menjadi pemilih yang cerdas; dan (3) pembentukan pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkontaminasi dengan residu politik, seperti *money politic* dan kampanye hitam.

Alasan agar pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu, pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas, dan pembentukan pola pikir atau paradigma pemilih pemula sesuai dengan tujuan pendidikan politik atau sosialisasi politik menurut Zamroni. Menurutnya tujuan dari sosialisasi politik atau pendidikan politik adalah masyarakat khususnya remaja memiliki: (1) pengetahuan politik; (2) kesadaran politik; (3) nilai, sikap dan orientasi politik, dan (4) mampu berpartisipasi politik (Zamroni, 2001: 25). Jadi latar belakang tersebut menyentuh tiga dimensi dari pendapat Zamroni yaitu dimensi partisipasi politik, dimensi kesadaran politik dan dimensi nilai, sikap dan orientasi politik. Dimensi partisipasi politik juga disinggung oleh Ruud Veldhuis sebagai salah satu tujuan dari pendidikan politik, yang dia sebut dengan *participatory skills* atau mengembangkan warga negara yang memiliki kemampuan berpartisipasi (Ruud Veldhuis, 1997: 8). Hanya saja partisipasi menurutnya lebih luas, tidak hanya partisipasi dalam pemilu, tapi juga partisipasi dalam mempengaruhi suatu pembentukan kebijakan.

Namun kiranya memberikan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu itu penting bagi sebuah negara demokrasi. Karena partisipasi mereka akan menentukan para pemimpin maupun wakil mereka di pemerintahan. Robert Dahl (dalam Kacung Marijan, 2010: 112-113) mengatakan bahwa, “di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga negara di dalam pemilu”. Hal ini menandakan betapa pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Disamping itu partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu partisipasi yang mudah diukur untuk mengetahui tingkat legitimasi suatu rezim yang sedang berkuasa. Pemilihan umum dianggap suatu bentuk partisipasi yang mudah diukur intensitasnya, antara lain dengan perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (*voter turnout*) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih (Miriam Budiardjo, 2008: 375). Jadi melalui pemilu dapat dilihat seberapa besar tingkat partisipasi warga negara dalam dunia politik (dalam arti minimalis). Tingginya partisipasi juga akan menentukan legitimasi suatu rezim yang terpilih.

Alasan untuk pembentukan pemilih cerdas yang memilih berdasarkan pertimbangan rasional seperti memilih berdasarkan kapabilitas seseorang, visi dan misi, dan kemampuan calon untuk menjawab kebutuhan masyarakat juga merupakan alasan yang penting. Hal ini karena pemilih pemula khususnya remaja itu cenderung memilih berdasarkan pertimbangan emosional. Mereka memilih seperti yang dipilih oleh orang tuanya, atau teman sebayanya. Padahal belum tentu calon yang dipilih orang tua maupun teman sebayanya merupakan calon yang baik. Seorang pemilih harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan rasional tersendiri untuk menentukan calon yang akan dipilihnya.

Terkait dengan pemilih cerdas sendiri secara konseptual sama dengan konsep pemilih rasional. Menurut Firmanzah (2008: 121), pemilih tipe rasional lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon

kontestan dalam program kerjanya. Program kerja atau '*platform*' partai yang berorientasi ke masa depan, tetapi juga menganalisis apa saja yang telah dilakukan partai tersebut di masa lampau. Kinerja partai atau calon kontestan biasanya termanifestasikan pada reputasi dan 'citra' yang berkembang di masyarakat. Jadi pemilih tipe ini, memilih didasarkan atas pertimbangan rasionalitas, memilih didasarkan pada visi-misi dan program kerja yang ditawarkan oleh partai politik/kontestan pemilu. Pemilih cerdas juga diarahkan untuk menjadi pemilih yang menggunakan rasionalitasnya sebagai pemilih. Mereka diarahkan untuk memilih berdasarkan visi dan misi, rekam jejak, dan orang-orang yang memang bisa kerja atau memiliki kapasitas dan kapabilitas managerial yang mencukupi.

Sebenarnya masih ada tipe pemilih di atas pemilih rasional, yaitu pemilih kritis. Pemilih kritis mempunyai ikatan ideologis tinggi pada partai politik, tidak semudah pemilih rasional untuk berpaling ke partai lain. Jadi orientasi mereka tidak hanya pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dalam menyelesaikan permasalahan tapi juga pada orientasi yang bersifat ideologis. Ikatan ideologis menjadikan pemilih mempunyai loyalitas pada partai atau kontestan tertentu.

Walau memiliki ikatan ideologis yang kuat, mereka juga kritis dengan kebijakan yang diambil kendatipun oleh partai yang didukung. Mereka selalu menganalisis kaitan antara sistem nilai partai (ideologi) dengan kebijakan yang dibuat.

Pembentukan pemilih tipe kritis kalau dikaji lebih mendalam menjadi domain partai politik. Karena, partai politiklah yang mempunyai kepentingan untuk membuat pemilih memiliki ikatan ideologis dengan partainya. Banyaknya pemilik kritis akan membawa keuntungan bagi parpol saat pemilu maupun pasca pemilu. Saat pemilu partai diuntungkan karena pemilih tipe ini akan lebih cenderung memilih partai yang menjadi pilihannya selama ini. Pasca pemilu, parpol diuntungkan dengan sikap pemilih kritis yang berperan aktif untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang berjalan.

Kehadiran pemilih cerdas juga akan mengikis pemilih tipe skeptif. Pemilih skeptif tidak memiliki orientasi ideologi cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting. Golongan putih (golput) di Indonesia atau dimanapun sangat didominasi oleh pemilih jenis ini. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun/partai manapun yang memenangkan pemilu tidak akan bisa membawa bangsa ke arah perbaikan (Firmanzah, 2008: 124).

Alasan untuk membentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkontaminasi residu politik berhubungan dengan tujuan pendidikan politik sebagai pembentukan nilai, sikap dan orientasi politik. Hanya saja alasan tersebut lebih sempit daripada pembentukan nilai, sikap dan orientasi politik. Pembentukan pola pikir semacam itu hanya menyentuh pembentukan sikap politik seseorang, bagaimana seseorang itu memiliki sikap politik yang demokratis menjunjung tinggi prinsip *fairness* (kejujuran) tidak menentukan pilihan atas dasar

pragmatisme, dan menjunjung tinggi suportifitas yang berdasar atas *rule of law* dalam berkompetisi di ajang pemilu.

2. Peranan KPU Kabupaten Sleman dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula

KPU Kabupaten Sleman selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Sleman memiliki tugas dan fungsi tambahan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di tingkat daerah. Fungsi dan tugas tersebut termaktub dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satunya adalah fungsi sosialisasi politik. Fungsi sosialisasi politik disamping dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi melalui berbagai media, juga dilakukan dalam bentuk pendidikan politik. Pendidikan politik ini dilaksanakan khusus bagi pemilih pemula dalam tiga bentuk, (1) workshop, (2) Olimpiade Pemilu, dan (3) TOT.

Dalam literatur akademik, sebenarnya peran KPU sebagai agen dalam pendidikan politik jarang disebut Afan Gaffar (2002: 102) sendiri misalnya menyebutkan beberapa agen atau media dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu: keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai media elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio. Gabriel A. Almond (dalam Mochtar Mas'ood&Colim Mac Andrews, 2001: 37-40) menyebutkan beberapa agen dalam melakukan sosialisasi politik yaitu, (1) keluarga, (2) sekolah, (3)

kelompok bergaul, (4) pekerjaan, (5) media massa, dan (6) kontak-kontak politik langsung.

Gabriel A. Almond maupun Afan Gaffar tidak menyebutkan secara eksplisit lembaga semacam KPU sebagai agen pendidikan politik. Namun, dapat dicermati dari pendapat Gabriel A. Almond yang menyebutkan salah satu agen sosialisasi politik atau pendidikan politik adalah kontak-kontak politik langsung. KPU dalam kedudukannya sebagai lembaga penunjang negara kiranya menempati posisi sebagai kontak-kontak politik langsung. Mengingat KPU sendiri merupakan merupakan jembatan antara pemilu dan pemilih, jadi ada peran krusial dari KPU sendiri. Disamping itu lembaga KPU sendiri merupakan infrastruktur sistem politik yang memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sistem politik yang sedang berjalan.

Namun yang menjadi pertanyaan penting adalah apakah KPU merupakan agen formal, non-formal, atau informal. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menganalisis peran KPU dalam pendidikan politik dengan ciri-ciri agen formal, non-formal, atau informal.

KPU Kabupaten Sleman melakukan peranan pendidikan politik melalui tiga macam program yaitu, workshop, TOT, dan Olimpiade Pemilu. Ketiga program tadi merupakan program yang secara eksplisit masuk dalam program kerja KPU Kab. Sleman. Program tersebut terstruktur, jauh-jauh hari program ini direncanakan, dibuat panduan

khusus dari masing-masing program, disamping itu juga ada nara sumber khusus yang ditunjuk mengisi masing-masing program.

Ketiga program tersebut kiranya memenuhi ciri-ciri pendidikan non-formal yang dapat dilakukan melalui kursus dan penataran. Kursus menurut KBBI (2008: 784), merupakan pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Jadi kursus direncanakan dalam waktu tertentu dengan materi-materi spesifik yang telah dirancang sebelumnya. Sedang, penataran (KBBI, 2008: 1459) adalah suatu proses untuk mengajar (memberikan pendidikan, pelatihan, kursus, dsb) tambahan untuk meningkatkan mutu (kemampuan, pengetahuan, keterampilan). Program workshop dan TOT apabila dicermati secara seksama masuk dalam pendidikan politik non-formal. Dimana workshop dan TOT merupakan kegiatan khusus untuk meningkatkan pengetahuan pesertanya mengenai materi tentang demokrasi dan pemilu. Disamping itu program-program tersebut juga merupakan program yang terstruktur yang memiliki panduan pelaksanaan, dengan tujuan, materi, metode, nara sumber yang telah ditentukan, dan bisa saja dibuat berjenjang.

Sebagai agen pendidikan non-formal KPU menurut Bapak Djajadi memiliki domain menyampaikan atau mencerdaskan terkait dengan hal-hal kepemiluan. Dari aspek teknis, prosedur, tahap-tahap, sampai bagaimana seseorang itu bisa menjadi pemilih. Bapak Hazwan menambahkan domain KPU itu lebih pada bagaimana proses pemilu itu dipahami secara benar

dan utuh, dan bagaimana output, atau pasca pemilu dapat dikawal oleh masyarakat.

Pendapat dua komisioner KPU tersebut di atas memperlihatkan bahwa peran pendidikan politik yang diusung KPU itu pada hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Namun, tidak sebatas masalah teknis pemilu melainkan masalah substansial pula, seperti pembentukan pemilih yang cerdas. Terkait domain khusus pada penyelenggaraan pemilu sendiri, hal ini dapat dipahami karena KPU merupakan penyelenggara pemilu. Jadi tugas pendidikan politik yang diembannya diarahkan untuk menunjang tugas dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini justru dapat menjawab permasalahan diperlukannya agen pendidikan politik yang fokus pada ranah penyelenggaraan pemilu secara teknis maupun substantif.

Secara umum ada tujuan utama yang hendak dicapai pada sosialisasi di berbagai media dan pendidikan politik adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilu

- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilihan umum
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2011: 1)

Dari kelima tujuan umum yang digariskan KPU, terlihat lebih operasional dan hanya menyentuh aspek pemilu. Hal ini wajar mengingat pendidikan politik oleh KPU itu dilakukan sebagai penunjang tugas penyelenggaraan pemilu. Dapat dilakukan komparasi antara tujuan tersebut dengan tujuan pendidikan politik menurut beberapa ahli.

Zamroni (2001: 25) mengatakan suatu sistem politik akan bisa langgeng jikalau mendapatkan dukungan dari warga negara masyarakat. Oleh karena itu, bangsa, atau lebih tepatnya penguasa, baik yang memiliki sistem politik kapitalis, komunis, sosialis atau apapun sistem politik yang dianut penguasa tersebut, perlu melaksanakan sosialisasi politik, khususnya dikalangan remaja. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik; dan mampu berpartisipasi dalam politik, sehingga aktif memberi dukungan dan kelak bisa melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini.

Tanpa adanya keberhasilan dalam sosialisasi politik akan muncul gejala politik yang berkepanjangan yang merupakan pencerminan tidak adanya dukungan warga masyarakat terhadap sistem politik yang ada, yang akan membawa akibat sistem politik runtuh atau diganti.

Dari pendapat Zamroni di atas terlihat bahwa tujuan dari sosialisasi politik atau pendidikan politik adalah masyarakat khususnya remaja memiliki: (1) pengetahuan politik; (2) kesadaran politik; (3) nilai, sikap dan orientasi politik, dan (4) mampu berpartisipasi politik. Kesemua tujuan tadi bermuara untuk mendidik warga negara yang aktif memberi dukungan dalam melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini.

Ada beberapa tujuan pendidikan politik yang dipaparkan Zamroni di atas yang terakomodasi dengan tujuan program pendidikan politik oleh KPU, yaitu tujuan agar masyarakat atau remaja memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, dan mampu berpartisipasi politik. Hanya saja KPU mengkontekstkan tiga tujuan ini dengan penyelenggaraan pemilu. Tujuan untuk memiliki pengetahuan politik dikerucutkan dengan pengetahuan mengenai pentingnya pemilu, dan tentang tahapan dan program pemilu. Tujuan kesadaran politik dikerucutkan pada kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilihan umum. Sedang tujuan partisipasi politik difokuskan pada partisipasi untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Ada kesamaan tujuan umum program pendidikan politik oleh KPU dengan tujuan pendidikan politik yang diungkapkan oleh Zamroni mengisyaratkan bahwa KPU memiliki konsep yang jelas yang hendak dicapai. Mengenai pengerucutan pada bidang pemilu sendiri dapat dipahami sebagai upaya penunjang tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini justru menjawab diperlukannya agen khusus untuk mengcover aspek-aspek pendidikan politik yang berkaitan langsung dengan pemilu.

Dalam ketiga program pendidikan politik disampaikan materi terkait dengan demokrasi, pemilu (arti penting pemilu dan sistem pemilu), aspek-aspek teknis pemilu, tahapan-tahapan pemilu, karakteristik calon pemimpin yang baik, Pancasila, dan UUD 1945. Jadi secara keseluruhan ada 7 materi yang disampaikan dalam tiga program KPU.

Materi-materi tadi sebagian memenuhi aspek-aspek pendidikan politik seperti yang diungkapkan oleh John J. Patrick (dalam Rudd, 1997: 41-42). Materi arti penting demokrasi, Pancasila dan UUD 1945 memenuhi aspek *knowledge of citizenship and government in democracy*. Arti penting demokrasi dan arti penting pemilu memenuhi bagian *concepts on the substance democracy* atau konsep dari demokrasi substansial. Materi UUD 1945 memenuhi aspek *constitutions of democratic government* (konstitusi pemerintahan demokratis). Arti penting pemilu dan pengawasan pasca pemilu secara substansial akan masuk dalam *participatory skill of*

democratic citizenship atau kemampuan untuk partisipasi oleh warga negara di negara demokrasi.

Program workshop tahun 2011, TOT dan Olimpiade Pemilu tahun 2012 selebihnya akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Pembahasan mengenai ketiga program ini didasarkan pada tiga sumber, yaitu wawancara dengan komisioner-komisioner KPU (terdiri dari Ketua KPU, komisioner yang secara langsung bertanggung jawab pada pelaksanaan program, yaitu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas, dan SDM, dan nara sumber program). Kedua, wawancara dengan peserta program pendidikan politik, dalam hal ini siswa-siswa peserta workshop dan Olimpiade Pemilu, dan guru PKn pendamping workshop dan Olimpiade Pemilu sekaligus peserta TOT pemilu. Ketiga, dokumentasi yang berupa laporan-laporan dari program-program tadi. Ketiga sumber ini akan dicross check antara yang satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan data yang valid.

a. Workshop tahun 2011

Dari hasil wawancara dengan Bapak Djajadi terungkap bahwa workshop tahun 2011 merupakan awal dari program-program pendidikan politik oleh KPU. Workshop ini diselenggarakan oleh KPU bagi pemilih pemula dan guru PKn. Pemilih pemula dalam hal ini adalah siswa-siswa kelas X dan XI SMA/SMK/MA sederajat di

kabupaten Sleman. Setiap sekolah mengirimkan 1 orang guru pendamping (guru mata pelajaran PKn) dan 5 orang siswa.

1) Tujuan Program

Program workshop ini memiliki tiga tujuan, pertama menyediakan referensi/bahan ajar bagi guru PKn sebagai bagian dari skateholder pendidikan atau secara luas dimaknai dengan pendidikan demokrasi. Kedua, mewujudkan upaya pendidikan yang berkesinambungan dan tidak instan atau menjelang digelarnya pemilu saja. Dan ketiga, terbentuknya pemilih pemula yang berkualitas dan siap berperan aktif dalam agenda demokrasi.

Tujuan pertama ditekankan pada guru sebagai pendidik di sekolah. Sedang tujuan kedua dan ketiga dikhususkan pada pemilih pemula. Jika dicermati tujuan ketiga, mengcover salah satu tujuan politik, yaitu bagaimana menjadikan seorang pemilih itu mau berpartisipasi aktif. Hal ini disandarkan pada pendapat tujuan pendidikan politik menurut Joko J. Prihatmoko (2003: 180), dia mengatakan bahwa sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik, yaitu membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat.

2) Materi dan Metode Program

Workshop ini menyampaikan 4 materi, pertama, mencangkup pentingnya pemilu. Kedua, karakteristik calon yang baik. Ketiga, penyusunan daftar pemilih. Dan keempat, simulasi pemungutan suara. Dari wawancara dengan beberapa pendamping workshop dan peserta workshop, semua mengungkapkan bahwa materi-materi di atas memang disampaikan pada acara di tahun 2011 lalu. Semuanya menggerucut pada materi tentang pemilu, baik tata cara pemilu, syarat-syarat menjadi pemilih maupun menjadi kontestan pemilu, ketentuan yuridisnya, karakteristik calon pemimpin yang baik, simulasi pemungutan suara, penyusunan daftar pemilih dan terkait dengan demokrasi.

Keempat materi yang disampaikan yaitu, 1) mencakup pentingnya pemilu, 2) karakteristik calon yang baik, 3) penyusunan daftar pemilih dan 4) simulasi pemungutan suara dapat dikorelasikan dengan aspek-aspek pendidikan politik yang diungkapkan oleh para ahli. Salah satunya Byron G. Massialas (dalam Cholisin, 2004: 27-28), menyatakan *Political socialization may be measured through the use of indexes, the most important of which are: (1) Political efficacy; (2) Political trust; (3) Citizen duty; (4) Expectations for political participation; (5) Political knowledge; and (6) Other nation or world concept.*

Materi petingnya pemilu, penyusunan daftar pemilih dan simulasi pemungutan suara menyentuh aspek *citizen duty* dan *political participation*. Dengan menyampaikan ketiga materi tersebut siswa akan menyadari bahwa dirinya mempunyai kewajiban sebagai warga negara salah satunya memberikan suara pada pemilihan. Disamping itu siswa juga dibekali mengenai pengetahuan tentang pemilu, hal ini menyentuh sebagian kecil dari aspek *political knowledge*. Tapi aspek lain *Political efficacy*, *political trust* *Expectations for political participation* dan *other nation or world* belum tersentuh.

Dalam penyampaian tiga materi tadi digunakan metode BRIDGE (*Building Resources In Democracy, Government and Election*) yang dicetuskan oleh UNDP (*United Nation for Development Program*) dengan menggali tata cara aplikasi pendidikan pemilih agar menarik dan menyenangkan serta dapat diajarkan secara kontinyu di sekolah. Pola BRIDGE ini mengedepankan keaktifan peserta/siswa sehingga secara langsung terlibat dalam memahami arti penting dan tahapan teknis pemilu. Disamping itu juga menggunakan metode *role playing* dan *meta plan*.

Metode *role playing* digunakan untuk menyampaikan materi tentang kerja komponen-komponen penyelenggara pemilu, seperti KPPS. Para siswa dalam program ini diajak memerankan

KPPS ketika suasana pemilihan umum di TPS. Sedangkan metode *meta plan* digunakan salah satunya untuk menganalisis kriteria-kriteria calon pemimpin yang baik. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Endang Dwi Haryani (Guru SMA N 1 Turi) yang mengatakan bahwa metode yang digunakan antara lain *meta plan* dan *role playing*.

3) Pelaksanaan

Dalam prakteknya program ini dilaksanakan dalam tiga zona, yaitu zona timur, zona tengah dan zona barat. Pada tiap-tiap zona memiliki jadwal pelaksanaan sendiri-sendiri. Secara keseluruhan pada tiga zona tersebut sebagian besar pemateri adalah Bapak Hazwan. Disamping Bapak Hazwan, nara sumber lain adalah Bapak Hamdan dan ketua KPU sendiri. Sehingga secara keseluruhan nara sumber dipegang oleh komisioner-komisioner KPU, belum ada nara sumber lain yang diundang dari pihak luar KPU.

Tiap-tiap materi dilaksanakan dengan sesi-sesi khusus. Sesi pertama menyampaikan materi tentang pentingnya pemilu. Materi ini disampaikan dengan kemasan sederhana, yaitu dengan diskusi kelompok untuk mengungkap pentingnya seorang pemimpin. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok, (1) kelompok

dengan pimpinan, (2) kelompok tanpa pimpinan, dan (3) pengamat.

Dari pelaksanaan diskusi tersebut diharapkan muncul kesimpulan-kesimpulan ideal tentang jalannya diskusi dari kelompok satu dan dua. Bagi kelompok satu yang diskusi dengan pimpinan, kesimpulan idealnya diskusi akan terarah, fokus, efektif, demokratis, dan hasil dari diskusi akan dicapai. Sedangkan bagi kelompok kedua yang tanpa pimpinan, diskusi tidak berjalan dengan lancar, kurang fokus, boros waktu, dan hasil diskusi tidak tercapai. Dari diskusi tersebut kemudian ditarik kesimpulan bahwa pimpinan dibutuhkan dalam kelompok terkecil hingga di wilayah kabupaten (bupati), provinsi (gubernur), maupun pemerintah pusat (presiden).

Pelaksanaan penyampaian materi seperti yang dipaparkan di atas akan melibatkan peran aktif siswa (peserta). Hal tersebut kiranya efektif untuk menggugah pemahaman peserta terkait dengan pentingnya pemilu. Hal ini kemudian dilengkapi dengan penjelasan mengenai apa itu pemilu, dan seperti apa pemilu di Indonesia dengan menggunakan pijakan pada UU No. 10 tahun 2008.

Sesi II diisi dengan materi tentang karakteristik pemimpin yang baik. Materi ini disampaikan dengan diskusi. Para peserta

dibagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok tersebut kemudian mendiskusikan kriteria-kriteria apa yang harus dimiliki oleh calon pemimpin yang baik dan memberikan argumen atas pendapatnya.

Dengan konsep penyampaian materi ini, para peserta akan mendapat stimulus untuk memikirkan atau bahkan merenungkan sejatinya pemimpin seperti apa yang baik itu. Ini akan melatih peserta untuk memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan atau memilih pemimpin mereka. Pertimbangannya harus didasarkan pada karakteristik tertentu yang kemudian baik menurut mereka.

Pada sesi materi inilah para pemilih pemula diarahkan agar menjadi pemilih yang cerdas. Mereka harus memilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersifat rasional. Rasional dalam hal ini adalah menyangkut tentang visi dan misi, program kerja yang ditawarkan, dan rekam jejak. Dengan hadirnya pemilih-pemilih cerdas, pemilih-pemilih tipe skeptif akan dapat ditekan. Sehingga nantinya, para pemilih pemula dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih saat pemilu.

Sesi tentang penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dibuat minimalis, dengan mengulas orang-orang yang bisa menjadi pemilih tetap. Disodorkan berbagai daftar yang berisi nama, latar belakang, umur, dan keadaan psikologis. Data tersebut

kemudian dicermati dan disimpulkan mana yang memenuhi kriteria untuk menjadi pemilih, dan mana yang tidak.

Materi ini akan bermanfaat manakala secara praktis pemilih pemula menemui permasalahan terkait dengan hak seseorang menjadi pemilih. Dengan pengetahuan awal terkait syarat-syarat menjadi pemilih, mereka akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sesi terakhir adalah simulasi pemungutan suara. Dalam sesi ini peserta berbagi peran sebagai pemilih, petugas KPPS dari nomor 1 sampai 7, keamanan, saksi dan sebagainya. Disini dimainkan peran dari mulai alur pendaftaran, penerimaan surat suara, penandaan/pemberian suara, memasukkan surat suaranya ke kotak suara, dan penandaan jari.

Dari simulasi pemungutan suara ini, para peserta akan merasakan secara langsung terlibat dalam proses suatu pemilihan. Kiranya ada 2 manfaat langsung yang didapat oleh peserta. Pertama, peserta memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang tahap-tahap pemungutan suara. Pengetahuan itu akan cukup dimengerti dan terinternalisasi karena dipraktikkan secara langsung. Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Rahadi (Guru SMA N 1 Sleman) bahwa metode simulasi sangat efektif karena tidak seperti metode yang disampaikan secara teoritis anak mudah

lupa, dan kurang minat. Dengan pengetahuan ini peserta akan lebih siap ketika dikemudian hari harus menyalurkan haknya dalam pemungutan suara. Kedua, simulasi ini akan menjadi model untuk pemilihan Osis. Pemilihan Osis di sekolah akan lebih efektif sehingga menjadi pembelajaran berdemokrasi yang baik di sekolah.

b. Olimpiade Pemilu tahun 2012

1) Tujuan program

Program Olimpiade Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut:

- (1) Memberi pemahaman tentang aspek-aspek demokrasi dan pemilu kepada pemilih pemula tingkat SMA sederajat.
- (2) Mendorong pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilu dan pemilukada (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2012: 3)

Dua tujuan di atas menyentuh dua tujuan pendidikan politik yang dikatakan oleh Zamroni. Tujuan pertama menyentuh aspek memberikan pengetahuan politik. Sedangkan tujuan kedua menyentuh aspek partisipasi politik. Tujuan kedua bisa dibilang relatif tercapai. Dari peserta Olimpiade yang diwawancara penulis mereka menyatakan keinginannya untuk aktif dalam pemilu maupun pemilukada. Alasannya secara umum mengerucut pada

dua alasan yaitu, (1) sebagai warga negara yang baik, dan (2) ingin menentukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik menurut mereka adalah pemimpin yang jujur, dapat dipercaya, sederhana, dan peduli sama rakyatnya. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan rasional dalam menentukan calon pemimpin yang baik menurut mereka.

2) Materi

Materi olimpiade terdiri dari empat tema yaitu, Pancasila, UUD 1945, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan pemilihan umum di Indonesia. Materi olimpiade ini lebih luas cakupannya daripada workshop tahun 2011.

Dari empat tema yang diangkat secara substantif dapat memenuhi aspek *political efficacy*, dengan memahami fungsi pemerintah dan adanya perasaan bahwa ia atau warga negara yang lain memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan politik. *Citizen duty*, dengan memiliki perasaan berkewajiban terhadap pemerintahnya yang diekspresikan lewat pemberian suara dalam pemilihan, menjalankan hukum dan peraturan. *Political knowledge*, dengan mendalami pengetahuan tentang dasar negara (Pancasila), UUD 1945, dan pemilu di Indonesia. Jadi banyak aspek yang disentuh dalam program ini.

Penggunaan pendidikan politik melalui olimpiade pemilu sama seperti workshop di tahun 2011 merupakan penggunaan metode belajar politik, yaitu menyiapkan diri tentang peranan politik yang diinginkan. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang digali dari olimpiade pemilu, peserta akan lebih memahami politik secara tekstual maupun kontekstual sehingga mempunyai bekal cukup untuk terjun dalam urusan politik seperti mengikuti pemilu, sebagai kontestan maupun pemilih.

Pemasukan materi Pancasila juga melaksanakan metode *generalization*. Pancasila merupakan nilai-nilai paling dasar yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, dengan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila secara mendalam akan menjadikan pola-pola budaya politik siswa terbentuk. Olimpiade ini menjadi semacam evaluasi atau pendalaman pengetahuan dan pemahaman siswa terkait dengan Pancasila. Hal ini melengkapi pengetahuan dan pemahaman peserta yang telah didapat melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

3) Pemenang Olimpiade Pemilu

Dalam olimpiade tersebut SMA N 1 Sleman meraih Juara pertama, menyisihkan 67 tim dari 48 SMA dan SMK di Kabupaten Sleman. Sementara Juara 2 diraih oleh tim SMKN 2 Depok dan juara ketiga dan juara keempat masing-masing diraih

oleh tim SMAN 2 Nganglik dan SMAN 2 Sleman
(www.jogjatv.tv)

c. TOT tahun 2012

1) Tujuan kegiatan

Kegiatan TOT ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Memberi pemahaman tentang aspek-aspek demokrasi dan pemilu, serta pemilu di Indonesia kepada guru-guru PKn tingkat SMA/SMK/MA sederajat
- b) Mendorong guru-guru PKn menjadi agen sosialisasi bagi anak didiknya melalui proses kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolahnya masing-masing
- c) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemilu dan pilukada

(Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pilukada, 2012: 6)

Tujuan-tujuan dalam program TOT ini sebenarnya merupakan hal yang sudah melekat pada guru PKn. Materi terkait pemahaman tentang aspek-aspek demokrasi dan pemilu (secara umum maupun di Indonesia) sudah menjadi pengetahuan wajib bagi guru PKn. Sejak mengejar gelar sarjana, calon sarjana PKn mempelajari secara intens materi-materi tersebut dalam ruang-

ruang kuliah. Jadi sudah seharusnya guru PKn paham mengenai kedua materi tadi.

Disamping itu materi-materi tersebut masuk dalam pembelajaran PKn di sekolah. Untuk tingkat SMA sederajat sendiri materi tersebut masuk dalam aspek Kekuasaan dan Politik. Aspek ini, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi (BNSP, Standar Isi). Materi ini disampaikan di kelas XI semester 1, dan kelas XII semester 2.

Guru-guru PKn juga secara langsung memang menjadi agen-agen sosialisasi politik atau pendidikan politik. PKn merupakan agen pendidikan politik formal. Gabriel A. Almond (dalam Mochtar Mas'ood & Colim Mac Andrews, 2001: 37), sendiri menyebutkan bahwa “pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan sengaja dirancang demi tujuan sosialisasi politik, disamping juga untuk tujuan lain”. Jadi PKn memiliki tujuan melakukan sosialisasi politik di sekolah. PKn sebagai pendidikan politik berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa agar mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekaran politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik

(*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.

2) Materi dan metode kegiatan

Materi TOT ini terdiri dari demokrasi, sistem pemilu (secara umum dan yang dipakai di Indonesia), pemilu di Indonesia, pencalonan, dan penyusunan daftar pemilih (Laporan Kelompok Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada, 2012: 7).

Materi demokrasi, sistem pemilu, dan pemilu di Indonesia disampaikan oleh Bapak Mohammad Najib. Beliau merupakan komisioner KPU Provinsi DIY kala itu.

Cakupan materi demokrasi yang beliau sampaikan menyangkut: pengertian demokrasi, urgensi pemilu dalam demokrasi, dan syarat demokrasi. Sedangkan materi sistem pemilu menyangkut definisi sistem pemilu, urgensi sistem pemilu, jenis sistem pemilu, induk sistem pemilu, dan sistem pemilu di Indonesia. Materi pemilu di Indonesia mencakup pemilu 1955, pemilu era orde baru, dan pemilu era reformasi. Dalam pembahasan pemilu di era reformasi juga dibahas mengenai pencalonan.

Selanjutnya materi tentang penyusunan daftar pemilih disampaikan oleh komisioner KPU Sleman, Bapak Hamdan, dan

Bapak Hazwan. Disamping menyampaikan materi tentang penyusunan daftar pemilih, mereka juga menyinggung tentang sistem pemilu di Indonesia.

Materi-materi di atas memang yang disampaikan dalam realisasi pelaksanaan TOT. Peserta-peserta TOT yang penulis wawancari menyebutkan materi-materi tersebut yang disampaikan saat TOT. Menurut Bapak Rahadi (Guru SMA N 1 Sleman), Bapak Pratiknyo (Guru SMA N 1 Ngaglik), Ibu Endang (Guru SMA N 1 Turi), dan Bapak Supardi (Guru MAN Yogyakarta III) materi-materi saat TOT memang seputar demokrasi, sistem pemilu (secara umum dan yang dipakai di Indonesia), pemilu di Indonesia, pencalonan, dan penyusunan daftar pemilih.

Materi-materi tersebut sebenarnya sudah masuk dalam mata pelajaran PKn. Jadi adanya program ini lebih dianggap sebagai pengayaan atau pendalaman. Hal ini disampaikan oleh Bapak Supardi (Guru MAN Yogyakarta 3), menurutnya program TOT di tahun 2012 itu sebagai pengayaan bagi guru PKn. Hal yang penting adalah penambahan pengetahuan mengenai metode dalam penyampaian materi, bukan materi secara substantif. Karena materi-materi tersebut sudah menjadi hal wajib dipahami oleh guru PKn, hanya saja tentang penyusunan daftar pemilih itu wajar jika guru PKn ada yang kurang paham. KPU sebagai

penyelenggara pemilu, dimaklumi jika lebih memahami ranah tersebut.

Pada program TOT ini metode yang digunakan adalah pendidikan orang dewasa. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian diberi tugas dari nara sumber. Secara aplikatif digunakan metode *meta plan* dan *power point* dalam penyampaian materi-materi tadi.

Saat penyampaian materi tentang sistem pemilu di Indonesia dengan menggunakan metode *meta plan* ada guru yang salah menempatkan kertas *meta plan*. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hamdan selaku salah satu nara sumber TOT. Ketika *dicross ceck* dengan guru-guru peserta TOT, guru-guru mengiyakan hal tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa itu hanya sedikit. Bapak Supardi, Bapak Pratiknyo, dan Ibu Endang menambahkan bahwa itu bisa jadi terjadi karena ada sarjana di luar PKn yang menjadi guru PKn. Jadi, wajar jika para guru lintas sarjana tadi kurang paham materi-materi PKn. Apalagi sekolah swasta PKn itu kadangkala diajarkan oleh sarjana Jurusan Pendidikan Sejarah.

Adapun *meta plan* tersebut berjumlah 14 buah. Di bawah ini akan dipaparkan kertas tugas tersebut.

Setiap daerah pemilihan wakilnya majemuk/banyak	Setiap partai menyajikan daftar kandidat sama atau lebih banyak dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan dalam daerah pemilihan
Pemilihan tidak hanya satu putaran	Pemilih memilih satu partai atau kandidat
Surat suara memuat nama, nomor urut dan foto calon	Partai mendapat kursi sebanding dengan apa yang diperoleh
Jika tidak dapat suara mayoritas absolut maka putaran kedua dilaksanakan	Kandidat yang terpilih adalah yang berhasil melampaui ambang batas suara tertentu
Pemilih dapat mengubah pilihannya terhadap calon yang telah dipilih sebelumnya	Surat suara memuat nama, nomor, dan lambang partai serta nomor urut dan nama kandidat
Sejumlah partai politik dapat berkoalisi mengusung calon	Setiap daerah pemilihan memiliki wakil majemuk (4 orang)
Sistem pemilihan tidak rumit, lebih memudahkan pemilih	Calon terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak
Partisipasi pemilih dapat	Calon tidak hanya diusulkan

menurun pada putaran terakhir	oleh parpol akan tetapi bisa perseorangan
Mudah digunakan dan mudah pula cara menghitung suaranya	Calon mewakili daerah tertentu

Kertas tugas di atas kemudian disusun menjadi dua bagian, pertama ciri-ciri sistem pemilu distrik. Dan kedua, ciri-ciri sistem pemilu proporsional. Jika dicermati ada beberapa bagian dari kertas tugas di atas yang kurang jelas merupakan ciri-ciri dari sistem pemilu yang mana. Hal ini terjadi lantaran kontennya justru spesifik pada ciri-ciri pemilu tertentu. Seperti konten calon tidak hanya diusulkan oleh parpol akan tetapi bisa perseorangan. Konten tersebut merupakan ciri pemilu di Indonesia. Dimana calon itu bisa dari dua jalur, jalur partai politik dan jalur independen.